Isu Sepekan
Bidang Kesra, Komisi VIII
Minggu ke-3 Juli
(14 s.d. 20 Juli 2025)
2025

BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging research to parliament
Evidence based policy making

KAMPUNG JEMAAH HAJI INDONESIA

Achmad Muchaddam Fahham
Analis Legislatif Ahli Madya
achmad.fahham@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Setiap tahun, Indonesia mengirimkan ratusan ribu jemaah haji dan jutaan jemaah umrah ke Arab Saudi. Sebagai negara dengan jumlah jemaah terbesar di dunia, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pelayanan, akomodasi, dan logistik bagi para jemaah selama berada di tanah suci. Untuk menjawab tantangan tersebut, Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mengajukan gagasan pembangunan kampung jemaah haji Indonesia di Makkah. Ide ini lahir dari kebutuhan jangka panjang untuk meningkatkan kenyamanan, efisiensi, dan integrasi layanan ibadah haji bagi lebih dari 220.000 jemaah Indonesia setiap tahunnya. Dalam kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi pada awal Juli 2025, Presiden Prabowo mengajukan gagasan tersebut ke pemerintah Arab Saudi. Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), menyambut baik gagasan tersebut serta menyatakan kesediaan untuk mendukungnya secara prinsip. Bahkan, MBS dikabarkan telah memberikan konsesi lahan seluas 50 hektare di kawasan strategis Jabal Umar selama 100 tahun kepada Indonesia. Jabal Umar berada hanya beberapa kilometer dari Masjidil Haram.

Gagasan kampung haji bukan sekadar pemondokan, melainkan kawasan terpadu yang mencakup akomodasi, layanan kesehatan, pusat informasi, dan fasilitas ibadah. Lokasi yang diusulkan berada hanya sekitar 400 meter dari Masjidil Haram, menjadikannya sangat strategis dan ramah bagi jemaah lansia maupun penyandang disabilitas. Presiden Prabowo menyebut bahwa kampung ini akan menjadi "perkampungan haji permanen" yang dibangun dari nol atau melalui akuisisi hotel *existing*. Namun lebih dari itu, kampung haji Indonesia bisa menjadi etalase kehadiran bangsa dalam lanskap diplomasi ibadah, sebuah isu yang kerap menjadi tantangan teknis sekaligus politis di balik layar pelaksanaan haji.

Ada sejumlah alasan mengapa kampung haji penting: *pertama*, jumlah jemaah Indonesia sangat besar. Indonesia secara konsisten menjadi pengirim jemaah haji dan umrah terbanyak di dunia, yakni lebih dari 220.000 jemaah haji setiap tahun dan sekitar 1,5 juta jemaah umrah per tahun. Dengan jumlah sebesar itu, kebutuhan akan penginapan, makanan, transportasi, dan pelayanan kesehatan sangat besar dan menuntut sistem pengelolaan yang lebih efisien. *Kedua*, menekan biaya akomodasi dan logistik. Salah satu beban terbesar dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah tingginya biaya sewa hotel dan logistik di Makkah. Dengan adanya kampung haji, pemerintah bisa memiliki properti sendiri untuk jemaah. Mengurangi ketergantungan pada penyedia layanan lokal. Menekan biaya sewa tahunan dan biaya konsumsi. Hal ini dapat berkontribusi pada penurunan biaya haji dan umrah di masa mendatang. *Ketiga*, sentralisasi layanan jemaah. Kampung haji Indonesia di Makkah akan menjadi pusat layanan terpadu untuk jemaah Indonesia. Fasilitas yang bisa tersedia seperti, asrama penginapan jemaah, klinik dan layanan kesehatan darurat, dapur umum untuk konsumsi jemaah, ruang manasik dan edukasi, serta kantor penghubung haji Indonesia di Arab Saudi. Model ini memungkinkan penanganan jemaah secara lebih cepat, aman, dan terorganisir. *Keempat*, meningkatkan citra indonesia secara internasional. Pembangunan kampung haji juga berfungsi sebagai bagian dari diplomasi

budaya dan identitas nasional. Kampung ini akan menjadi tempat representatif yang menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mengelola haji. Lingkungan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan keramahan khas Indonesia, serta menjadi simbol penghormatan bagi kontribusi jemaah Indonesia terhadap dunia.

Meski mendapat lampu hijau, realisasi kampung haji masih dalam tahap kajian teknis dan regulasi. Pemerintah tengah mempertimbangkan tiga skema: membangun dari nol, mengakuisisi hotel, atau menyewa jangka panjang. Kepala Staf Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa pembentukan tim lintas sektor sedang disiapkan untuk merumuskan peta jalan pembangunan. Oleh karena itu, agar gagasan ini tidak terhenti sebagai retorika diplomatik, dibutuhkan sinergi lintas lembaga, landasan hukum yang solid, serta perencanaan yang inklusif dan berbasis data. Kampung haji idealnya dirancang sebagai ekosistem terpadu yang memenuhi prinsip keberlanjutan, akses universal, dan pelayanan yang memanusiakan jemaah. Dari sisi spasial, zonasi berbasis kebutuhan seperti lansia, disabilitas, dan jemaah dengan penyakit kronis harus menjadi elemen inti, bukan sekadar tambahan. Dari sisi layanan, integrasi sistem *customer relationship management* dan pemanfaatan teknologi pemantauan jemaah secara *real time* dapat menjadikan kampung ini sebagai model pelayanan haji berbasis digital, terukur, dan responsif terhadap dinamika lapangan.

Atensi DPR

Komisi VIII DPR RI memiliki peran krusial untuk menjembatani visi eksekutif dengan instrumen legislatif dan pengawasan. Komisi VIII DPR RI diharapkan tidak hanya mendorong alokasi anggaran dan dukungan kebijakan, tetapi juga terlibat aktif dalam merancang kerangka regulasi, menyusun standar operasional pelayanan, dan memastikan adanya evaluasi berkala terhadap efektivitas kampung haji kelak. Kampung haji diharapkan dapat menjadi laboratorium kebijakan pelayanan haji, tempat di mana pendekatan humanistik, teknokratik, serta spiritual bisa diuji dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Sumber

beritasatu.com, 1 Juli 2025;
kompas.com, 15, 16, dan 21 Juli 2025;
metronews.com, 1 Juli 2025; dan
tirto.id, 16 Juli 2025.

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR
Polhukam Ahmad Budiman, Prayudi, Rachmi Suprihartanti S., Novianti
Ekkuinbang Sri Nurhayati Q., Mandala Harefa, Ari Mulianta Ginting, Eka Budiyanti, Venti Eka Satya, Teddy Prasetiawan
Kesra Trias Palupi K., Luthvi Febryka Nola, Yulia Indahri

LAYOUTER
Devindra Ramkas O., Ully Ngesti Pratiwi, Desty Bulandari, Yustina Sari, Masyithah Aulia A., Ulayya Sarfina, Yosephus Mainake, M. Z. Emir Zanggi, Muhammad Insan F., Audry Amaradyaputri, Timothy Joseph S. G., Nur Sholikah P. S., Fieka Nurul Arifa

https://pusaka.dpr.go.id @pusaka_bkdprri
©PusakaBK2025
Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making